

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI  
TERHADAP RASIO GINI DI PULAU JAWA  
PADA TAHUN 2006-2018**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk  
memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:  
**HANDANI NARAPADYA**  
2013110041

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN**  
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018  
**BANDUNG**  
**2019**

# **EFFECT OF ECONOMIC GROWTH ON THE GINI RATIO ON JAVA ISLAND IN 2006-2018**



## **UNDERGRADUATE THESIS**

**Submitted to complete part of the requirements for  
Bachelor's Degree in Economics**

**By:  
Handani Narapadya  
2013110041**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY  
FACULTY OF ECONOMICS  
PROGRAM IN DEVELOPMENT ECONOMICS  
Accredited by National Accreditation Agency No. 1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018  
BANDUNG  
2019**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN**



**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP  
RASIO GINI DI PULAU JAWA PADA TAHUN 2006-  
2018**

Oleh:

**Handani Narapadya  
2013110041**

**Bandung, Juni 2019**

**Ketua Program Sarjana Ekonomi Pembangunan,**

**Ivantia Savitri Mokoginta, Ph.D**

**Pembimbing,**

**Noknik Karliya Herawati, Dra., M.P.**

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Handani Narapadya  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 25 Juni 1994  
NPM : 2013110041  
Program Studi : Sarjana Ekonomi Pembangunan  
Jenis naskah : Skripsi

## JUDUL

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP RASIO GINI DI  
PULAU JAWA PADA TAHUN 2006-2018**

Pembimbing : Noknik Karliya Herawati, Dra., M.P.

## MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri:

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat merupakan peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 15 Mei 2019

Pembuat pernyataan:



Handani Narapadya

## ABSTRAK

*Pada tahun 2018 penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah pulau Jawa sebesar 58,61 persen dimana Pulau Jawa merupakan pusat pertumbuhan. Faktanya ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan rasio gini menunjukkan nilai rasio gini tertinggi di Indonesia didominasi oleh wilayah-wilayah di Pulau Jawa. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penyebab dari ketimpangan pendapatan yang terjadi di Pulau Jawa dengan cara melihat hubungan dan signifikansi dari variabel investasi, pendidikan, tingkat pengangguran, dan Upah Minimum Provinsi terhadap rasio gini. Observasi penelitian sebanyak 6 provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2006-2018. Dengan teknik estimasi PLS (Panel Least Squares), hasil menunjukkan bahwa nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap rasio gini di Pulau Jawa. Sedangkan nilai Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) dan nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap rasio gini di Pulau Jawa. Namun nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap rasio gini di Pulau Jawa.*

*Kata kunci : Rasio Gini, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Ketimpangan Pendapatan*

## **ABSTRACT**

*In 2018, the largest contributor to Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) was Java, which amounted to 58.61 percent where Java was the center of growth. The fact that income inequality is measured using the Gini ratio shows that the value of the highest Gini ratio in Indonesia is dominated by regions on Java. The research objective is to find out the causes of income inequality that occurred in Java Island by looking at the effects and significance of investment, education, unemployment, and provincial minimum wages to the Gini ratio. Research observations were 6 provinces in Java Island in 2006-2018. With the PLS estimation technique (Panel Least Squares), the results show that the value of Domestic Investment and the Provincial Minimum Wage value have a positive relationship and significant with the Gini ratio in Java Island. While the value of the Open Unemployment Rate and the value of the Angka Partisipasi Kasar (APK) has a positive relationship but not significant to the ratio of the Gini on Java Island. However, the value of the per capita Gross Regional Domestic Product (GRDP) has a negative relationship and significant to the Gini ratio in Java Island.*

*Key Word : Gini Ratio, Domestic Investment, Income Inequality*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah memberkati dan menyertai dengan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rasio Gini di Pulau Jawa pada tahun 2006-2018. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis dalam membantu menyelesaikan skripsi, antara lain:

1. Harianto Sumindra dan Umi Rosmawati selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi, nasihat serta doa kepada penulis.
2. Tiara Wulandari selaku adik kandung yang selalu mendukung dalam doa kepada penulis.
3. Ibu Noknik Karliya Herawati, Dra., M.P. selaku dosen pembimbing yang tulus membantu dalam memberikan bimbingan, saran, motivasi, serta kritik agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Dr. Miryam B. L. Wijaya selaku kepala Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Katolik Parahyangan.
5. Ibu Hilda Leilani Masniarita Pohan, SE., M.Si., Ph.D. selaku dosen wali penulis. Terima kasih untuk semua masukan, bimbingan serta ilmu yang selalu di berikan kepada penulis sehingga penulis dapat tetap bertahan di UNPAR.
6. Miranda Shrivilia selaku kekasih penulis. Terima kasih telah jadi sumber motivasi, dukungan, semangat dan kunci keberhasilan yang tidak akan dilupakan.
7. Pang-pang, Keven, Erik, Hendrik, Ryan selaku sahabat penulis. Terima kasih atas dukungan, canda tawa, keceriaan, hiburan, bantuan dan semangat yang diberikan kepada penulis yang tidak akan dilupakan.
8. Grup KEJORA yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan penulis di Program Studi Ekonomi Pembangunan UNPAR yaitu Muhamad Firmansyah dan Devin. Terima kasih telah memberikan dukungan kepada penulis.
10. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan UNPAR lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menemani dan telah membantu penulis selama berkuliah di UNPAR.

Tanpa dukungan, motivasi, serta doa dari mereka maka penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kasih karunia dan berkat kepada mereka yang telah membantu penulis selama studi di UNPAR. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan dengan baik kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan penulisan dimasa mendatang. Penulis juga berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada pembaca sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya.

Bandung, 14 Mei 2019

Handani Narapadya



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
1. Pendahuluan .....	1
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Kerangka pemikiran .....	6
2. TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1 Teori Ekonomi Pembangunan.....	8
2.1.1 Kurva Kuznet .....	9
2.1.2 Kurva Lorenz .....	10
2.2 Rasio Gini .....	10
2.3 Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	11
2.3.1 Investasi .....	12
2.3.2 Pendidikan .....	13
2.3.3 Tenaga Kerja .....	15
2.3.4 Upah .....	17
2.4 Penelitian Terdahulu.....	18
3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN .....	21
3.1 Metode Penelitian .....	21
3.2 Data dan Sumber data .....	21
3.3 Uji Asumsi .....	22
3.4 Objek Penelitian.....	23
3.4.1 Rasio Gini .....	24
3.4.2 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) .....	25
3.4.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita.....	26
3.4.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) .....	27
3.4.5 Upah Minimum Provinsi (UMP) .....	28
3.4.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	29
4. Hasil dan Pembahasan .....	30
4.1 Hasil Pengolahan Data .....	30
4.2 Uji Penggunaan <i>Common Effects dan Fixed Effects Model</i> . .....	31
4.3 Uji Asumsi Klasik .....	32

4.3.1 Uji Multikolinearitas .....	32
4.3.2 Uji Heteroskedastisitas .....	33
4.3.3 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial ( <i>t-stat</i> ) .....	35
4.3.4 Uji Koefisien Regresi Secara Simultan ( <i>F-stat</i> ) .....	36
4.4 Koefisien Determinasi ( <i>R-square</i> ) .....	37
4.5 Pembahasan .....	37
5. PENUTUP .....	41
Daftar Pustaka .....	43
LAMPIRAN .....	A-1
RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	A-3

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010, pada tahun 2010-2016 di Indonesia. (juta rupiah).....	1
Gambar 2. PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2000-2013 di Indonesia per provinsi (tahun dasar 2010) (ribu rupiah).....	2
Gambar 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita di Pulau Jawa (Ribu Rupiah) (Harga Konstan 2010) .....	3
Gambar 4. Kerangka Pemikiran.....	6
Gambar 5. Kurva Kuznet .....	9
Gambar 6. Kurva Lorenz.....	10
Gambar 7. Rasio Gini di Pulau Jawa pada tahun 2006-2018 (dalam %) .....	24
Gambar 8. Penanaman Modal Dalam Negeri di Pulau Jawa pada tahun 2006-2018 (dalam satuan miliar rupiah).....	25
Gambar 9. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita di Pulau Jawa pada tahun 2006-2018 (dalam ribuan rupiah) .....	26
Gambar 10. Angka Partisipasi Kasar di Pulau Jawa pada tahun 2006-2018 (SD,SMP,SMA, dalam %) .....	27
Gambar 11. Upah Minimum Provinsi (UMP) di Pulau Jawa pada tahun 2006-2018 (dalam satuan rupiah).....	28
Gambar 12. Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa pada tahun 2006-2018 (dalam %) .....	29

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data dan Sumber Data yang Digunakan .....	21
Tabel 2. Hasil Regresi Nilai Rasio Gini Pulau Jawa Sebagai Variabel Dependennya.....	30
Tabel 3. Hasil Pengujian <i>Redundant - Likelihood Ratio</i> .....	31
Tabel 4. Hasil Pengujian <i>Hausman test</i> . ....	32
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas.....	33
Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser. ....	34

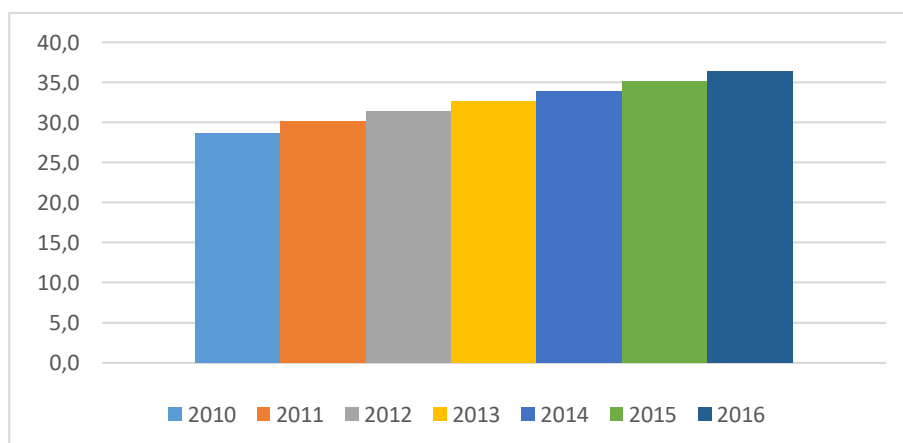
# 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar belakang

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang dan jasa ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut ditentukan oleh adanya kemajuan teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai keadaan yang ada (Jhingan, 2004). Dalam hal ini Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator dalam pertumbuhan ekonomi dan ukuran keseluruhan dari total produksi ekonomi suatu negara. PDB adalah total pendapatan yang diperoleh penduduk tetap suatu negara baik barang ataupun jasa (Mankiw, 2008).

Pada umumnya tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDB atas harga konstan atau disebut PDB Riil, dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar merupakan pertumbuhan volume barang dan jasa, bukan pertumbuhan yang masih mengandung kenaikan/penurunan harga.

**Gambar 1. PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010, pada tahun 2010-2016 di Indonesia. (juta rupiah)**



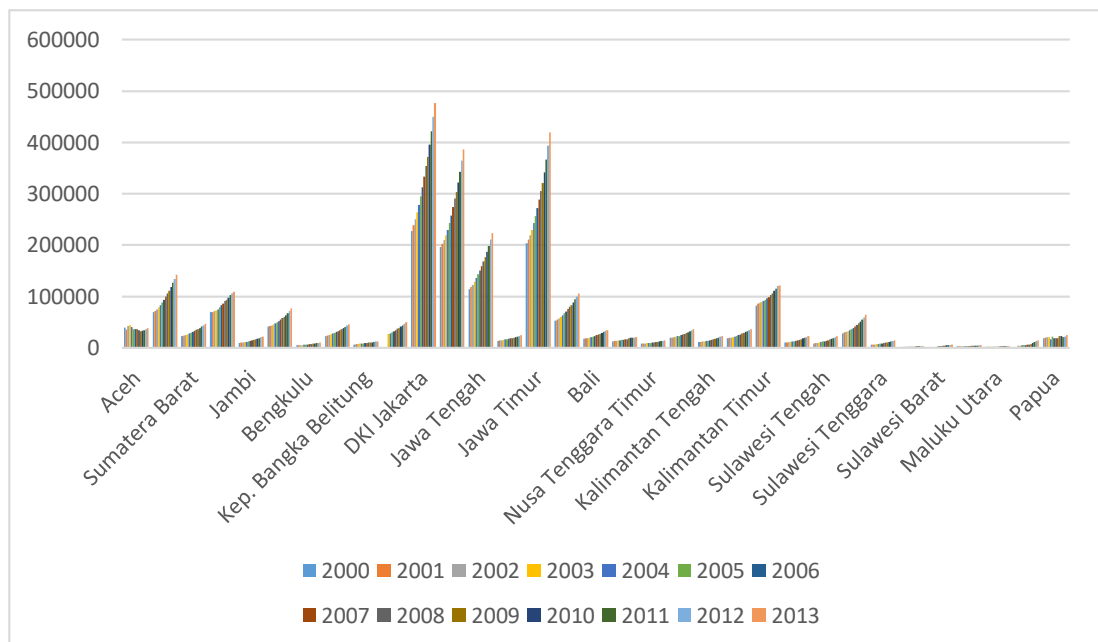
Sumber : BPS diolah

Pada gambar 1. Nilai PDB Riil Indonesia dari tahun 2010-2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata 4.6 juta rupiah setiap tahun. Peningkatan PDB riil ini dapat diasumsikan bahwa pendapatan masyarakat

Indonesiapun mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan peningkatan PDB Riil juga menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat Indonesia yang terus meningkat. Hal ini terlihat dari PDB perkapita Indonesia yang meningkat setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat PDB per kapita Indonesia meningkat menjadi US\$ 3.927 atau sekitar Rp 56 juta per kapita per tahun di 2018. Angka tersebut naik dibandingkan tahun 2017 Rp 51,9 juta dan 2016 Rp 47,9 juta (Laucereno, 2019).

Peningkatan PDB perkapita di Indonesia tidak diikuti oleh distribusi pendapatan yang merata. Besarnya ketimpangan pendapatan antar daerah masih terlihat jelas. Pendapatan perkapita menggambarkan tingkat kemakmuran (*Wealth*), daya beli (*purchasing power parity*), dan kemajuan pembangunan suatu negara (Barro J. R., 2003). Ketika PDB perkapita suatu wilayah rendah maka tingkat kemakmuran dan daya belinyapun akan rendah.

**Gambar 2. PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2000-2013 di Indonesia per provinsi (tahun dasar 2010) (ribu rupiah).**



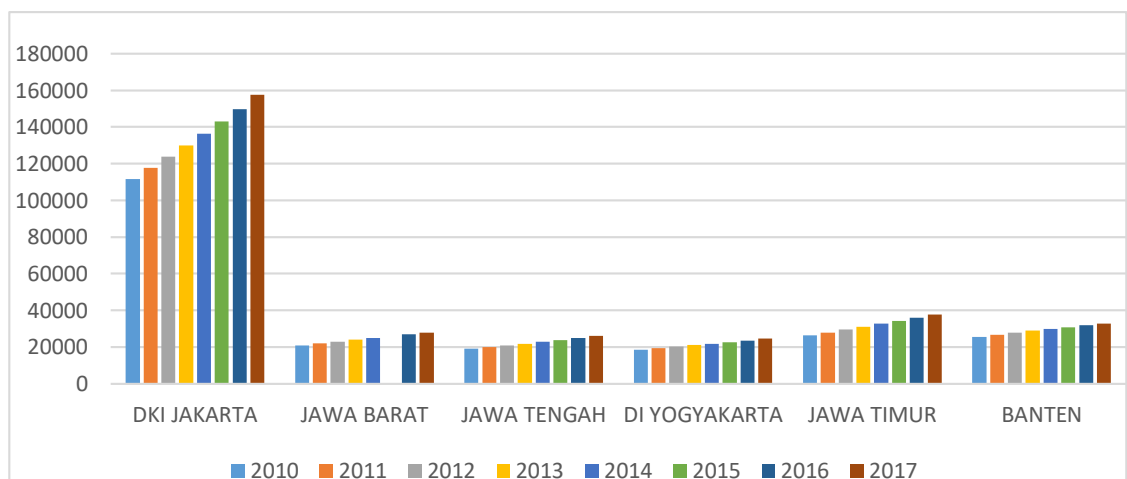
Sumber : BPS diolah

Pada gambar 2. menunjukkan ketimpangan pendapatan antar daerah yang tinggi, sebagai contoh pada tahun 2013 PDB riil perkapita tertinggi sebesar 477, 2 juta rupiah di DKI Jakarta sedangkan PDB riil perkapita terendah sebesar 3,6 juta rupiah di Gorontalo, selisih 473,6 juta rupiah. Selisih ini menunjukkan tingginya ketimpangan antar daerah yang menunjukkan daya beli masyarakat yang belum merata yang dipengaruhi oleh distribusi pendapatan yang masih timpang. Data menunjukkan kekayaan 43.000 orang terkaya di Indonesia (yang mewakili hanya

0,02% dari total penduduk Indonesia) setara dengan 25% PDB Indonesia dan kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia setara dengan 10,3% PDB (yang merupakan jumlah yang sama dengan kombinasi harta milik 60 juta orang termiskin di Indonesia) (Indonesia Investments, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia yang tinggi. Lembaga berkaliber Credit Suisse, Oxfam, INDIF, Bank Dunia telah mengumumkan ketimpangan Indonesia sangat darurat (Heikal, 2019).

Terpusatnya perekonomian di pulau-pulau tertentu menjadi kendala utama dalam pemerataan pendapatan di Indonesia. Data BPS kuartal 2 tahun 2018 menunjukkan distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) di Jawa dan Sumatera juga mendominasi, yakni 58,61 persen dan 21,54 persen sedangkan di Kalimantan sebesar 8,05 persen, di Sulawesi sebesar 6,2 persen, di Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,06 persen, seeta Maluku dan Papua sebesar 2,54 persen (Movita, 2018). Namun pertumbuhan ekonomi yang pesat di pulau Jawa menimbulkan ketimpangan tersendiri. Hal ini terlihat dari data BPS tahun 2017 yang menunjukkan 4 dari 7 provinsi dengan tingkat ketimpangan yang tertinggi terdapat di Pulau Jawa yaitu DI Yogyakarta dengan tingkat gini rasio sebesar 0,420 %, Jawa Barat dengan 0,413 % dan DKI Jakarta sebesar 0,411 %, serta Jawa Timur sebesar 0,402% (Denny, 2018). Rasio gini ini merupakan tolak ukur dalam mengukur tingkat kesenjangan pendapatan dalam hal ini dilihat dari tingkat PDRB perkapita di setiap wilayah khususnya di Pulau Jawa.

**Gambar 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita di Pulau Jawa (Ribu Rupiah) (Harga Konstan 2010)**



Sumber : BPS, 2017

Gambar 3. menunjukkan bahwa PDRB perkapita setiap provinsi di pulau Jawa masih timpang. Ketimpangan terlihat jelas pada tahun 2017 antara PDRB perkapita tertinggi yaitu provinsi Dki Jakarta sebesar Rp 157.684.000 dengan PDRB perkapita provinsi Di Yogyakarta sebesar Rp 24.534.000. Ketimpangan di Pulau Jawa ini menarik untuk

diteliti, dimana Pulau Jawa yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia faktanya memiliki ketimpangan pendapatan atau rasio gini yang tinggi.

Tingginya rasio gini akan menimbulkan dampak yang negatif bagi perekonomian khususnya di Pulau Jawa yang merupakan penopang perekonomian Indonesia. Dampak negatif ini berupa kecemburuan sosial yang menimbulkan ketegangan sosial dan kerusuhan rasial. Di sisi lain masih banyak orang miskin, menganggur dan akhirnya tersingkir. Satu hal yang tidak disadari atau ketimpangan menciptakan kecemburuan sosial yang terpendam di kalangan orang miskin. Sebagian besar masyarakat yang menjadi responden Bank Dunia menilai distribusi pendapatan “sangat tidak setara” dan mendesak pemerintah agar segera mengatasi ketimpangan. Sebab dapat kita katakan, para penganggur sangat mudah dipengaruhi karena tidak adanya kepastian finansial. Ketika penganggur ini menyatukan kekuataannya, pemberontakan dan kerusuhan tak terhindarkan bakal terjadi (Heikal, 2019). Hal ini yang membuat rasio gini di Pulau Jawa tidak dapat dianggap remeh, apalagi Pulau Jawa merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Namun provinsi-provinsi di Pulau Jawa memiliki nilai rasio gini tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Apabila rasio gini semakin tinggi yang diikuti kecemburuan sosial maka Pulau Jawa dengan jumlah penduduk yang banyak akan terjadi masalah dan perekonomian akan terancam.

Berkaitan dengan hal ini, pemerintah berupaya untuk mengurangi tingkat rasio gini di pulau Jawa melalui peningkatan pendidikan, peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP), investasi yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan meningkatkan PDRB perkapita. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di Pulau Jawa pada tahun 2016 sebesar Rp 80,7 triliun dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 180 ribu tenaga kerja. Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, sehingga investasi meningkat dan ketika investasi meningkat penyerapan tenaga kerja diharapkan akan lebih banyak. Secara nasional pemerintah menargetkan pada tahun 2019, angka rasio gini turun hingga 0,36 sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Target ini dirasakan akan tercapai karena peningkatan investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dirasa efektif dilihat dari data BPS di kuartal III tahun 2016, pertumbuhan ekonomi 5,02 persen menurut pengeluaran ditopang oleh konsumsi rumah tangga 2,70 persen, investasi swasta 1,30 persen, dan lainnya 1,02



persen. Upaya pemerintah dalam mencapai target ini adalah meningkatkan pendidikan, menaikkan Upah Minimum Regional (UMR) dan investasi.

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD) menunjukkan jumlah anak yang putus sekolah di jenjang pendidikan dasar berkurang signifikan, dari 60.066 di tahun 2015/2016 menjadi 32.127 di tahun 2017/2018. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 7,73 tahun (2014) menjadi 8,10 tahun (2017). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) juga meningkat dari 12,39 tahun (2014) menjadi 12,85 tahun 2017 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Hal ini dapat diasumsikan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) akan meningkat. Artinya wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Semakin tinggi Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersekolah atau terdidik maka produktifitas akan semakin tinggi sehingga terhindar dari masalah pengangguran atau tingkat pengangguran akan turun. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri mengungkapkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama empat tahun terakhir terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena tren pendidikan yang meningkat pada tahun 2015, dimana TPT dengan jenjang pendidikan SMK sebesar 12,65%, pada 2016 sebesar 11,11%, pada 2017 sebesar 11,41%, pada tahun 2018 menjadi 11,24%, angka ini relatif mengalami penurunan (Detik.com, 2018). Pemerintah berencana menaikkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8,03 persen pada 2019 mendatang hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Secara garis besar diasumsikan, ketika investasi mampu menyerap tenaga kerja, pendidikan dapat meningkatkan SDM, TPT menurun dan UMP dapat meningkatkan daya beli, ini semua akan mampu meningkatkan PDRB perkapita masyarakat secara merata sehingga mengurangi rasio gini baik melalui penyerapan tenaga kerja, pendidikan, maupun daya beli.

## **1.2 Rumusan Masalah**

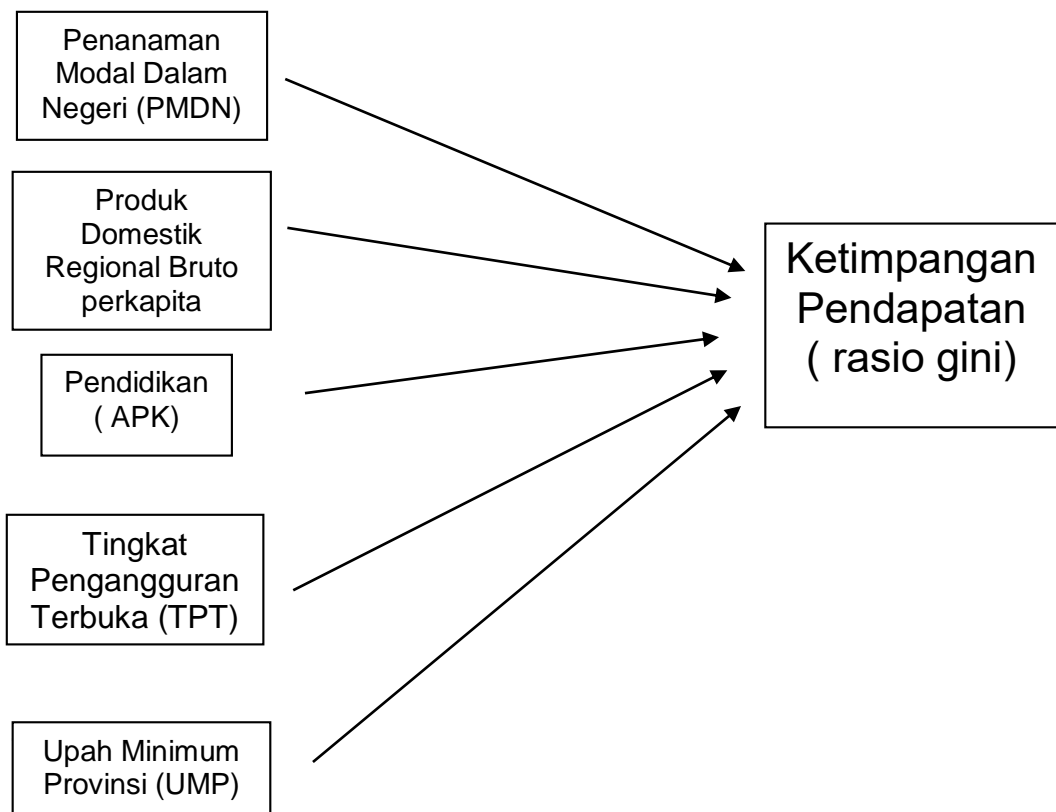
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, pada tahun 2018 penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah pulau Jawa sebesar 58,61 persen dimana Pulau Jawa merupakan pusat pertumbuhan. Faktanya ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan rasio gini menunjukkan bahwa nilai rasio gini tertinggi berada di wilayah-wilayah di Pulau Jawa.

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui hubungan dan signifikansi dari variabel investasi, pendidikan, tingkat pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto perkapita dan Upah Minimum Provinsi terhadap rasio gini khususnya di Pulau Jawa pada tahun 2006-2018. Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi bagi pembaca mengenai pengaruh Investasi dan faktor lain yang terkait terhadap rasio gini di pulau Jawa pada tahun 2006-2018. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan wawasan atau ilmu pengetahuan mengenai hubungan investasi dengan rasio gini.

### 1.4 Kerangka pemikiran

**Gambar 4. Kerangka Pemikiran**



Ketimpangan pendapatan (rasio gini) merupakan masalah dalam penelitian ini, dimana penelitian ini mencoba menganalisis masalah melalui investasi yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Menganalisis seberapa besar pengaruh PMDN terhadap rasio gini. Ketika adanya peningkatan PMDN maka akan terbukanya lapangan pekerjaan dan dapat menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang besar maka masyarakat akan mampu memiliki kesempatan bekerja lebih besar

dan akan mempunyai pendapatan sendiri sehingga ketimpangan pendapatan akan turun, dan juga seberapa besar pengaruh faktor lain seperti pendidikan yang dilihat dari peningkatan produktifitas manusia mampu mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi sehingga bisa menurunkan rasio gini.

Melalui pendidikan diharapkan masyarakat akan mampu memiliki produktivitas yang tinggi sehingga mampu memperoleh penghasilan baik dari bekerja maupun berbisnis, sehingga akan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat rasio gini dapat ikut turun. Ketika jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun maka orang yang bekerja lebih banyak artinya ketika masyarakat yang awalnya mengangur dan tidak memiliki pendapatan lalu memiliki pekerjaan dan memiliki pendapatan maka rasio gini akan menurun. Peningkatan pendapatan melalui peningkatan UMP diharapkan akan menurunkan rasio gini. Artinya ketika peningkatan pendapatan buruh atau karyawan menengah bawah meningkat dan pendapatan masyarakat menengah keatas tidak maka dapat terjadi pemerataan atau keseimbangan pendapatan yang berarti rasio gini menurun. Peningkatan PDRB perkapita diharapkan akan membantu mendorong menurunkan rasio gini. Ketika PDRB perkapita meningkat, artinya pendapatan rata-rata masyarakat per orang dalam suatu daerah ikut meningkat dan rasio gini akan turun.